

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020 meluncurkan sebuah inisiatif kebijakan pendidikan kepada perguruan tinggi seluruh Indonesia, yaitu Kampus Merdeka. Kampus Merdeka adalah program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan tinggi di tanah air¹. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada siswa dari semua latar belakang sosial ekonomi, dengan fokus pada komunitas yang kurang terwakili dan kurang beruntung.

Salah satu tujuan utama dari inisiatif Kampus Merdeka adalah untuk meningkatkan pemerataan dan inklusivitas sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengurangi disparitas akses pendidikan yang ada antardaerah, kelompok sosial ekonomi, dan gender. Dengan memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa dari komunitas yang kurang terwakili dan kurang beruntung untuk melanjutkan pendidikan tinggi, program ini diharapkan dapat mendorong mobilitas sosial dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang lebih kohesif dan setara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, inisiatif Kampus Merdeka telah menerapkan sejumlah strategi dan program. Salah satunya adalah pendidikan universitas dan perguruan tinggi baru di daerah tertinggal di negara ini. Ini telah membantu mendekatkan peluang pendidikan tinggi kepada siswa yang mungkin harus menempuh jarak jauh untuk mengaksesnya.

¹ Kampus Merdeka. 2020. Profil Kampus Merdeka. <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/> Diakses pada 18/11/2022

Strategi kunci lain dari inisiatif Kampus Merdeka adalah perluasan bantuan keuangan dan program beasiswa. Program-program ini memberikan dukungan finansial kepada siswa yang mungkin tidak mampu membayar biaya kuliah dan biaya lain yang terkait dengan pendidikan tinggi. Dengan membuat pendidikan lebih terjangkau, program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah siswa yang dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi dan mencapai tujuan akademik dan profesional mereka. Inisiatif Kampus Merdeka juga berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan yang ditawarkan di perguruan tinggi. Ini termasuk memberikan pelatihan dan dukungan untuk guru dan fakultas, serta berinvestasi dalam fasilitas dan sumber daya baru. Dengan memastikan bahwa siswa memiliki akses ke pendidikan berkualitas tinggi, program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kerja dan daya saing lulusan di pasar kerja.

Selain upaya tersebut, inisiatif Kampus Merdeka juga berhasil meningkatkan internasionalisasi pendidikan tinggi di Indonesia². Ini termasuk mendorong perolehan mahasiswa dan fakultas dengan institusi asing, dan mempromosikan pembentukan kemitraan dan kolaborasi dengan organisasi dan perusahaan internasional. Dengan membangun koneksi dengan komunitas global, program ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pendidikan yang lebih beragam dan menyeluruh, serta meningkatkan visibilitas dan reputasi pendidikan tinggi Indonesia di panggung global.

Salah satu cara untuk belajar yang disediakan dalam Kebijakan Kampus Merdeka adalah Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB). Bersama dengan program MSIB, terdapat juga beberapa program lainnya, seperti melakukan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, berpartisipasi

² Syaifudin. (2023, May 14). Prof. Komarudin: Prestasi mahasiswa UNJ pada program MBKM – IISMA terus meningkat setiap tahun. Prof. Komarudin: Prestasi Mahasiswa UNJ Pada Program MBKM – IISMA Terus Meningkatkan Setiap Tahun - TIMES Indonesia. <https://timesindonesia.co.id/indonesia-positif/454453/prof-komarudin-prestasi-mahasiswa-unj-pada-program-mbkm--iisma-terus-meningkat-setiap-tahun>

dalam kegiatan kewirausahaan, membuat studi atau proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Kebijakan ini diperkenalkan untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Kompetensi mahasiswa perlu disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tidak hanya terkait dengan dunia industri dan dunia kerja saat ini, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat.

Secara khusus, program MSIB dirancang untuk memberikan pengalaman kerja yang lebih nyata kepada mahasiswa. Sebelumnya, mahasiswa sering kali kurang mendapatkan pengalaman kerja di industri atau dunia profesi sebenarnya, sehingga kurang siap untuk bekerja setelah lulus. Magang dengan durasi yang singkat, kurang dari 6 bulan, tidak memberikan pengalaman dan keterampilan yang memadai bagi mahasiswa dalam konteks industri. Bahkan, perusahaan yang menerima mahasiswa magang menyatakan bahwa magang dengan durasi yang sangat pendek tidak terlalu bermanfaat bahkan dapat mengganggu aktivitas di industri. Program MSIB, yang berlangsung selama maksimal 2 semester, memberikan pengalaman yang memadai kepada mahasiswa melalui pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama program ini, mahasiswa akan mengembangkan keterampilan teknis (seperti keterampilan kompleks dalam pemecahan masalah, analisis, dan sebagainya) serta keterampilan sosial (seperti etika kerja, komunikasi, kerjasama, dan sebagainya). Industri juga mendapatkan manfaat dengan program ini karena mereka dapat merekrut langsung mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan mereka, mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan awal. Mahasiswa yang telah mengenal lingkungan kerja ini akan lebih siap dan mantap saat memasuki dunia kerja dan memulai karir mereka. Melalui kegiatan ini, permasalahan dan kebutuhan industri akan dikomunikasikan kepada perguruan tinggi, sehingga bahan ajar dan pendekatan pembelajaran dosen dapat diperbarui, dan topik-topik riset di perguruan tinggi menjadi lebih relevan. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang terdaftar pada PDDikti, serta mahasiswa dari berbagai jurusan di tingkat D3, D4, dan

S1, berhak mengikuti Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka dengan persetujuan dari perguruan tinggi yang mereka ikuti.³

Program MSIB Angkatan 3 dapat diikuti oleh mahasiswa yang sedang mengikuti program Diploma II dengan minimal semester 3, mahasiswa yang sedang mengikuti program Diploma II dengan minimal semester 4, serta mahasiswa program Sarjana atau Sarjana Terapan dengan minimal semester 5 saat program MSIB ini dimulai. Program MSIB Kampus Merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengasah keterampilan mereka dengan belajar dan bekerja secara langsung di industri. Durasi program ini adalah 16-24 minggu, dan kegiatan yang dilakukan dapat setara dengan 20 SKS..

Gambar 1.1.1 Insentif program MSIB

Magang Bersertifikat – Pemerintah memberikan paket insentif untuk mahasiswa, mentor, dan organisasi mitra / perusahaan

Komponen Pembiayaan	Deskripsi	Jumlah	Penerima	Jadwal
A Biaya Hidup Bulanan Peserta Magang	Bantuan biaya hidup bulanan peserta program magang	Online: 1.2 jt / bulan Offline: 2.8 jt / bulan	Mahasiswa	Per bulan
B Honor Mentor	Kompensasi mentor untuk pendampingan peserta program	Rata-rata 7 jt / bulan (Max.15 jt / bulan)	Mentor	Per bulan
C Biaya Pengembangan Program	Biaya pengembangan program untuk berbagai kegiatan, termasuk penyusunan modul dan pelatihan/pembinaan mentor	Maks. 250 juta untuk mitra baru	Mitra	Di akhir periode program
D Dana Transportasi	1 x perjalanan pergi dan pulang dari tempat domisili menuju tempat kegiatan; pesawat, kereta api, bus AKAP. Tidak termasuk transportasi dari dan ke bandara/stasiun/terminal dan transportasi penghubung. PCR (saat ini) dilakukan mandiri. Reschedule karena positif Covid-19 bisa dilakukan (disertai surat dokter).	At-cost Ticketing oleh agen travel vendor atau <i>reimbursement</i>	Mahasiswa	Bervariasi

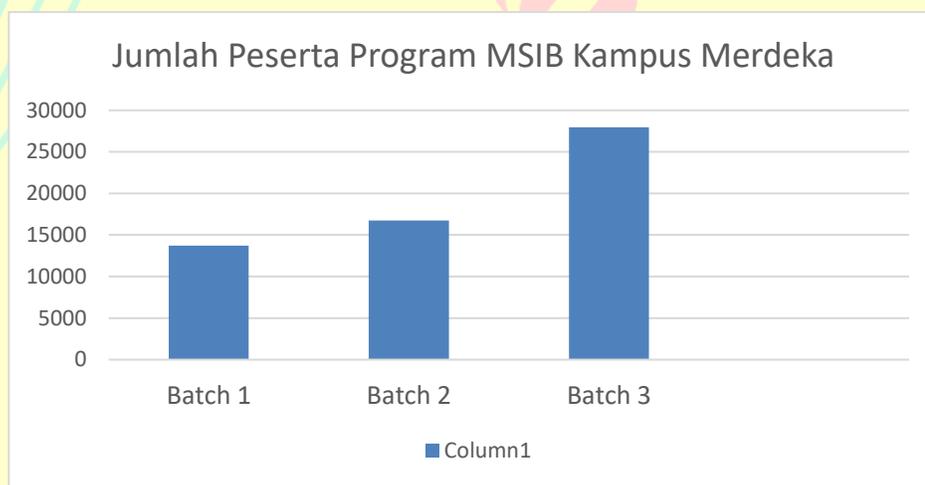


Sumber: Dokumentasi pribadi

³Ibid

Dalam pelaksanaan programnya kemendikbud menawarkan insentif berupa pendanaan. Pendanaan ini diberikan kepada pihak mahasiswa dan juga mitra Nantinya dana tersebut akan digunakan sebagai bantuan biaya hidup dan dana transportasi untuk pihak mahasiswa, sebagai honor untuk pihak mentor, dan juga biaya pengembangan program untuk pihak perusahaan mitra.

Gambar 1.1.2 Grafik Jumlah Peserta MSIB



Sumber: diolah dari berbagai sumber

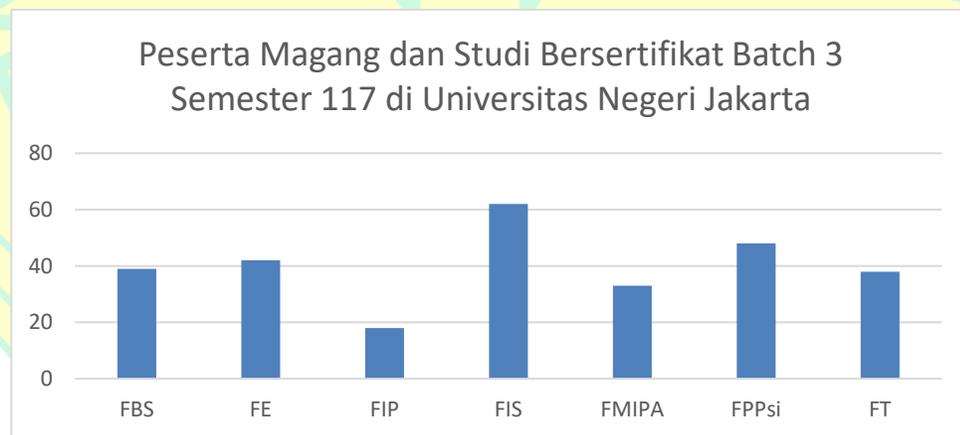
Dari segi jumlah partisipan peserta MSIB juga selalu mengalami kenaikan mulai dari semester ganjil 2021 hingga semester ganjil 2022⁴. Pada angkatan pertama MSIB memiliki jumlah peserta sebesar 13.272 mahasiswa, kemudian mengalami kenaikan pada semester genap 2022 menjadi 16.733 peserta hingga menjadi 27.952 peserta pada semester ganjil 2022. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa semakin lama program MSIB dari kampus merdeka semakin populer di kalangan mahasiswa. Program ini juga populer di universitas keguruan. Hal ini menjadi perhatian karena

⁴ Kemendikbud. 2022. Jumlah Peserta MSIB Angkatan 3 Tahun 2022 Diikuti 27.952 Mahasiswa. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/08/terus-meningkat-msib-angkatan-3-tahun-2022-diikuti-sebanyak-27952-mahasiswa#:~:text=Terus%20Meningkat%2C%20MSIB%20Angkatan%203,22%20Agustus%202022,%20%E2%86%90%20Back>. diakses pada 18/11/2022

jurusan Pendidikan pada umumnya tidak mewajibkan kegiatan magang sebagai syarat kelulusan.

Namun program magang dan studi independen bersertifikat juga menimbulkan berbagai pro dan kontra. Misalnya tidak semua kegiatan magang berhubungan langsung dengan program studi atau mata kuliah jurusan yang diambil oleh seorang mahasiswa. Akibatnya terdapat pihak dari perguruan tinggi yang masih enggan untuk memberikan konversi SKS kepada mahasiswa⁵. Kemudian adanya isu keterlambatan dana bantuan hidup peserta magang dari pihak penyelenggara⁶. Mahasiswa dengan mengikuti program ini akan menemukan beberapa konsekuensi yang muncul bagi pihak mahasiswa. Misalnya mahasiswa tidak akan mengikuti mata kuliah di lingkungan kampus asal. Hal ini berpotensi menyebabkan mereka untuk tidak memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang program studi mereka sendiri.

Gambar 1.1.3 Grafik Peserta MSIB di UNJ berdasarkan Fakultas



Sumber: Arsip UNJ

⁵ Sketsa Umul. 2021. *Dilema Magang Merdeka: SKS Tak Bisa Terkonversi* <https://www.sketsaunmul.co/berita-kampus/dilema-magang-merdeka-sks-tak-bisa-terkonversi/baca> diakses pada 18/11/2022.

⁶ CNN Indonesia. 2021. *Kemdikbud Buka Suara Soal Telat Bayar Uang Saku Magang Kampus Merdeka* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211119091912-20-723307/kemdikbud-buka-suara-soal-telat-bayar-uang-saku-magang-kampus-merdeka> diakses pada 18/11/2022.

Di Universitas Negeri Jakarta Program MSIB sendiri telah berjalan dari semester 115 atau semester ganjil tahun 2021, kemudian sampai saat ini, respon terhadap program kampus merdeka tergolong cukup besar. Dengan total 280 peserta pada batch ke 3 atau di semester 117 di UNJ. Fakultas Ilmu Sosial memiliki jumlah peserta terbesar yaitu 62 orang. Diikuti Fakultas Pendidikan Psikologi dengan jumlah peserta sebesar 48 orang. Hal ini cukup menarik mengingatkan Universitas Negeri Jakarta merupakan kampus kejuruan Pendidikan yang tidak semua program studinya mewajibkan kegiatan magang.

Implementasi program Magang dan Studi Independen (MSIB) di perguruan tinggi menjadi isu hangat dalam beberapa tahun terakhir. Program ini bertujuan untuk memberikan siswa pengalaman praktis dan keterampilan melalui pelatihan di tempat kerja atau studi mandiri di bidang atau industri tertentu. Namun, program tersebut mendapat tentangan dari beberapa jurusan yang berpendapat bahwa program tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama mereka. Program MSIB diimplementasikan di banyak perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Namun, penelitian tentang penerimaan dan implementasi program di perguruan tinggi, khususnya di UNJ, masih terbatas. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk membuat penelitian berjudul Implementasi Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka (Studi pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta). Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyelidiki implementasi program MSIB di UNJ dan untuk mengetahui bagaimana program tersebut diterima atau menghadapi penolakan.

Studi ini akan memberikan wawasan berharga tentang pengalaman dan perspektif jurusan pendidikan mengenai program MSIB dan akan membantu mengidentifikasi area di mana program dapat ditingkatkan agar lebih selaras dengan visi dan misi jurusan. Selain itu, temuan tersebut juga akan memberikan kontribusi untuk memahami tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan program MSIB di perguruan tinggi lain di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi

institusi atau pemerintah untuk mengevaluasi program dan dampaknya terhadap siswa dan masyarakat, dan memastikan bahwa program tersebut sejalan dengan tujuan keseluruhan untuk menyediakan pendidikan berkualitas dan mempersiapkan siswa untuk karir masa depan mereka.

1.2 Rumusan Permasalahan Penelitian

Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka merupakan salah satu inisiatif yang dihadirkan dalam dunia pendidikan tinggi sebagai bagian dari upaya untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta juga turut melaksanakan program ini dengan tujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih luas dan kontekstual kepada mahasiswa. Namun, dalam konteks implementasi Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka di fakultas tersebut, terdapat sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab. anyaan-pertanyaan tersebut menjadi titik tolak untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana program tersebut dijalankan dan apa dampaknya terhadap mahasiswa dan fakultas.

Selanjutnya, kendala dalam implementasi Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta menjadi aspek yang juga tidak dapat diabaikan. Dalam kenyataannya, pelaksanaan program ini dihadapkan pada sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi kelancaran dan kesuksesannya. Oleh karena itu, perlu untuk mengevaluasi dan menganalisis dengan cermat kendala-kendala yang ada, baik yang berasal dari aspek regulatif, normatif, maupun kultural kognitif. Bagaimana lingkungan akademik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta merespons implementasi program ini? Apa saja hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan manfaat dari program ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi landasan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang perlu diatasi agar implementasi Program Magang dan Studi

Independen Bersertifikat Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi seluruh pihak yang terlibat. Berdasarkan uraian tersebut diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta?
2. Bagaimana kendala pada implementasi Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menguraikan bagaimana implementasi program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
2. Menguraikan kendala yang terjadi pada implementasi program Magang dan Studi Independen Bersertifikat

1.4 Manfaat Penelitian

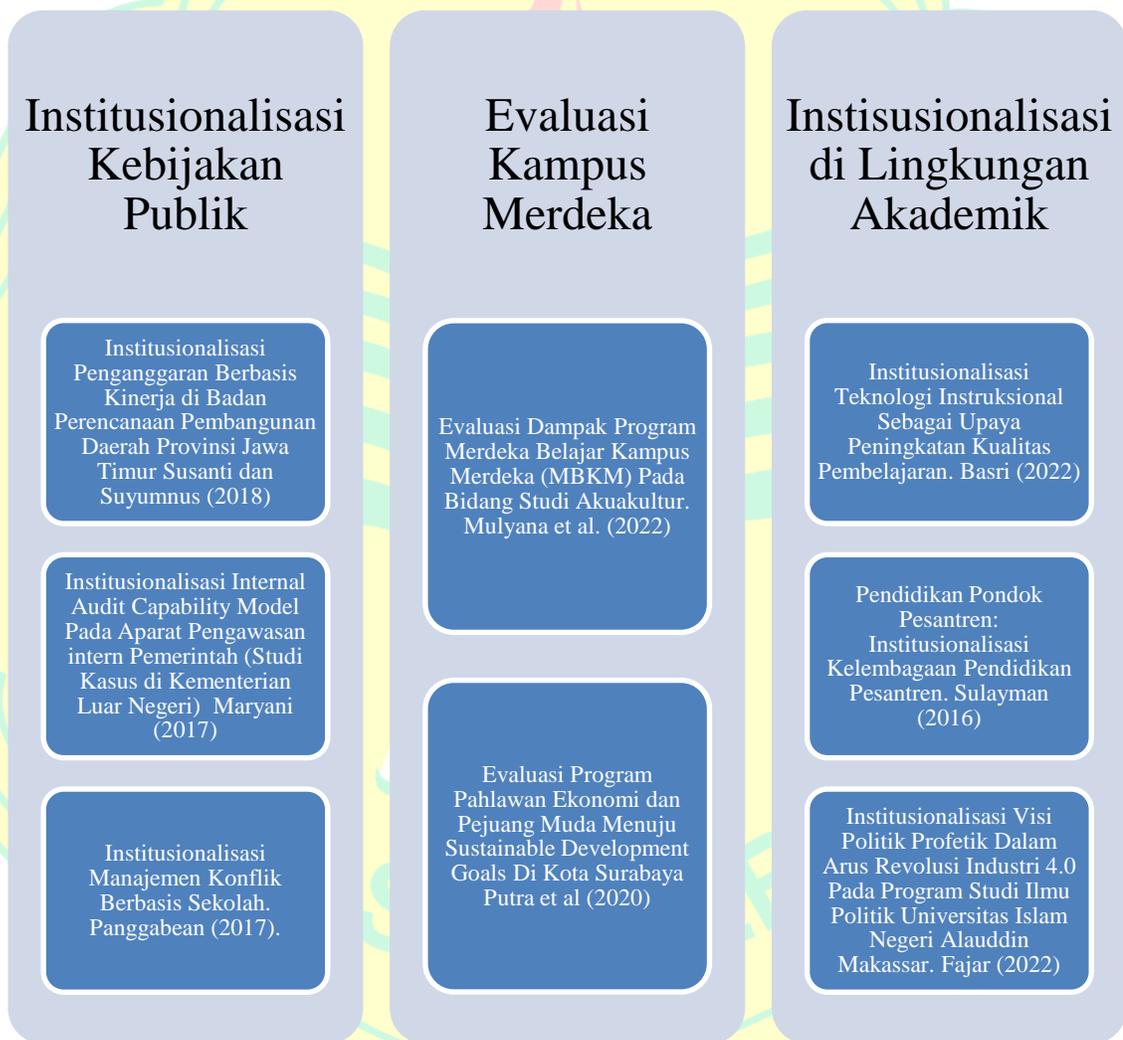
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan juga manfaat akademis bagi pembacanya.

1. Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan wawasan terhadap implementasi kegiatan magang dan studi independen bersertifikat baik dari dukungan maupun perlawanan yang diterima sehingga dapat menjadi bahan pengembangan program untuk kedepannya.

2. Secara akademis penelitian ini dapat menjadi referensi terhadap penelitian di bidang sejenis dan juga masukan bagi perguruan tinggi untuk mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan Kampus Merdeka.

1.5 Tinjauan literatur

Skema 1.5.1.1 Pemetaan Literatur



Yang Harus diteliti: Evaluasi Kampus Merdeka dari sudut institusionalisasi

1. **Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Tyarlin Maryani yang berjudul “*Institusionalisasi Internal Audit Capability Model Pada Aparat Pengawasan intern Pemerintah (Studi Kasus di Kementerian Luar Negeri)*” dalam jurnal yang dipublikasi oleh Manajemen dan Bisnis Ekonomi, Volume 22 Nomor 2 Tahun 2017⁷. Penelitian tersebut menggambarkan pemahaman tentang proses institusionalisasi Internal Audit Capability Model (IACM) internal pada APIP Kementerian Luar Negeri dan dampaknya. IACM merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan APIP secara mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan teori proposisi untuk menganalisis latar belakang institusionalisasi IACM dengan menggunakan Teori Institusional, dan implikasi yang terjadi dianalisis menggunakan teori Perubahan Organisasi berdasarkan tahapan perubahan menurut Lewin. Berdasarkan pada model tahapan perubahan menurut Lewin (1951), Kementerian Luar Negeri telah melalui beberapa langkah dalam masing-masing fase. Pada fase Unfreezing, dimulai dengan sosialisasi dan pelatihan untuk menyampaikan maksud, tujuan, dan pentingnya implementasi IACM agar semua pihak memiliki kesadaran dan pemahaman yang sama. Pada fase Movement, dibentuk Tim Self Assessment yang bertujuan untuk memperkuat kekuatan penggerak yang ada. Transfer informasi tentang kemajuan self assessment dan self improvement menjadi strategi untuk mengurangi resistensi yang muncul dari individu. Pada fase Refreezing, dilakukan langkah-langkah berkelanjutan dan menjaga komitmen bersama untuk meningkatkan target kapabilitas level 3. Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan. APIP akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi kemampuan yang dimiliki, kemampuan auditor internal, dan perbaikan yang perlu dilakukan dalam pengembangan individu, tim, dan

⁷ Maryani, T. (2017). Institusionalisasi internal audit capability model pada aparat pengawasan intern pemerintah (studi kasus di kementerian luar negeri). *Ekonomi Bisnis*, 22(2), 87-102.

organisasi. Selain itu, Kementerian Luar Negeri menetapkan kebijakan strategi untuk meningkatkan kapabilitas APIP yang mencakup rencana aksi seperti peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, untuk mencapai target tersebut, perlu ditetapkan bentuk formal rencana strategis, target, dan mekanisme monitoring agar Kementerian Luar Negeri terpacu untuk mencapainya.

2. **Kedua**, penelitian yang dilakukan Ari Susanti dan Mohamad Suyunus yang berjudul “*Institusionalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.*” dalam jurnal yang dipublikasi oleh Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Volume 16 Nomor 1 Tahun 2018.⁸ Reformasi dalam sistem penganggaran perlu dilakukan karena penganggaran dengan pendekatan tradisional (*traditional budget*) memiliki kelemahan, yaitu pada saat proses penyusunan, pembahasan sampai dengan penetapan anggaran daerah lebih terfokus pada besarnya anggaran. Pendekatan ini dinilai kurang efektif, terutama terkait dengan rendahnya tingkat transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi serta tidak jelasnya kinerja untuk mengukur layanan publik yang hendak dicapai. Pemerintah menerbitkan peraturan perundangan untuk mengeliminasi kelemahan atas sistem penganggaran tradisional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa sistem yang dianut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah anggaran berbasis kinerja (*performance budget*). Penelitian ini mengambil lokasi penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur dengan pertimbangan bahwa Bappeda Provinsi Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam

⁸ Susanti, A., & Suyunus, M. (2018). Institusionalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 16(1), 1-12.

pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2016, mempunyai tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang perencanaan pembangunan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus eksploratoris. Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi yang dilakukan oleh peneliti maka posisi kelembagaan Bappeda Provinsi Jawa Timur berada pada tahapan reproduction. Posisi ini mengharuskan Bappeda Provinsi Jawa Timur agar segera mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul sehingga prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja dapat terinstitusionalisasi secara optimal di organisasi. Diperlukan reformasi dalam sistem penganggaran karena pendekatan tradisionalnya memiliki kelemahan yang signifikan. Proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan anggaran daerah cenderung terfokus pada jumlah dana yang dialokasikan, yang tidak efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Kelemahan ini terkait dengan kurangnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan ketidakteraturan dalam mengukur kinerja layanan publik. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk mengatasi kelemahan dalam sistem penganggaran tradisional, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mendorong penggunaan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini difokuskan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur karena lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam pemerintahan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2016. Bappeda bertugas membantu Gubernur dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi

kasus eksploratoris. Hasil analisis dan interpretasi penelitian menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi Jawa Timur berada pada tahap reproduksi dalam posisi kelembagaannya. Dalam konteks ini, Bappeda perlu mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul agar prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja dapat diimplementasikan secara optimal dalam organisasi.

3. **Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Hasan Basri yang berjudul “*Difusi dan Institusionalisasi Teknologi Instruksional Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran*” dalam jurnal yang dipublikasi oleh Jurnal Penelitian Progressif Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022⁹. Penelitian ini menjelaskan bahwa Kehadiran teknologi telah memberikan berbagai kemudahan dalam mengelola aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan, di mana teknologi memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Belakangan ini, banyak lembaga pendidikan yang telah mengadopsi teknologi untuk memfasilitasi proses belajar-mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Bahkan, teknologi telah secara luas digunakan dalam sistem pendidikan jarak jauh. Namun, masih ada lembaga pendidikan yang belum sepenuhnya mengenal dan memanfaatkan teknologi instruksional. Ketidakfamiliaran ini disebabkan oleh difusi teknologi yang tidak merata dan keterbatasan dalam hal biaya dan sumber daya manusia di lembaga tersebut. Selain itu, para pengambil keputusan juga kurang antusias terhadap penggunaan teknologi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, inovasi akan terus terjadi karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal manusia serta interaksi antara keduanya. Faktor internal meliputi keinginan, kebutuhan, dan potensi individu untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan faktor eksternal mencakup masalah dan kesulitan yang dihadapi

⁹ Basri, H. (2022). Difusi Dan Institusionalisasi Teknologi Instruksional Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran. Jurnal Penelitian Progresif, 1(1), 1-14.

individu dalam memenuhi kebutuhannya, yang berasal dari perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Interaksi antara faktor internal dan eksternal ini menghasilkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tidak henti-hentinya. Pengembangan inovasi, khususnya dalam bentuk teknologi canggih, umumnya melalui empat tahapan: inovasi, imitasi, kompetisi teknologi, dan standarisasi.

- 4. Keempat**, penelitian yang dilakukan Rusydi Sulaiman yang berjudul “*Pendidikan Pondok Pesantren: Institusionalisasi Kelembagaan Pendidikan Pesantren*” dalam jurnal yang dipublikasi oleh Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman Volume 9 Nomor 1 Tahun 2016¹⁰. Penelitian ini membahas Pesantren, sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, sering kali dianggap sebagai subkultur karena memiliki keunikan dalam cara hidup, pandangan hidup, tata nilai, dan hierarki kekuasaan internal yang dihormati oleh komunitas dan masyarakat sekitar. Untuk mempertahankan keunikan pesantren, langkah strategis yang dapat diambil adalah menggagas Ma'had 'Aly sebagai upaya memperkuat pendidikan pesantren. Selain itu, perlu meningkatkan riset dan kajian ilmiah keislaman dengan mendirikan perguruan tinggi pesantren, yang akan menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mengembangkan ilmu-ilmu keislaman berbasis tradisi pesantren. Dalam kesimpulannya, peneliti menyatakan bahwa diperlukan terobosan baru untuk mengembangkan pondok pesantren sambil tetap mempertahankan sikap ortodoksinya. Konsep Ma'had 'Aly dan Perguruan Tinggi Pesantren sebagai gagasan untuk memperkuat kelembagaan pesantren dapat menjadi motivasi bagi pengelola atau pimpinan pesantren dalam melayani di pondok pesantren.

¹⁰ Sulaiman, R. (2016). Pendidikan Pondok Pesantren: Institusionalisasi Kelembagaan Pendidikan Pesantren. 'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman, 9(1), 148-174.

5. **Kelima**, penelitian yang dilakukan Rizal Panggabean yang berjudul “*Institusionalisasi Manajemen Konflik Berbasis Sekolah*” dalam jurnal yang dipublikasi oleh Sukma : Jurnal Pendidikan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2017¹¹. Penelitian ini membahas bahwa ada beberapa elemen Metode Keilmuan Berbasis Sekolah (MKBS) yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam tulisan ini, kami akan membahas beberapa strategi pelebagaan yang dapat digunakan. Dengan mengadopsi strategi pembelajaran kolaboratif dan manajemen kelas yang inklusif, guru dapat mengintegrasikan pendidikan resolusi konflik ke dalam kurikulum yang ada. Misalnya, ketika mempelajari sejarah, siswa dapat terlibat dalam diskusi mengenai negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Belanda selama masa perang kemerdekaan. Mereka juga dapat mempelajari tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi, Abdul Gaffar Khan, Nelson Mandela, Abdurrahman Wahid, dan kontribusi mereka terhadap perdamaian. Implementasi MKBS di sekolah dapat dilakukan melalui tiga jalur pelebagaan, yaitu melalui individu, kelompok, dan peraturan sekolah. Meskipun masih terbatas, pengalaman aktual dari sekolah-sekolah yang telah menerapkan MKBS sudah dapat dikaji dan dievaluasi untuk pengembangan lebih lanjut.
6. **Keenam**, penelitian yang dilakukan Desvanda Arya Putra, Reyndi Rusmanjaya, M. Hifdzi Rusydany, dan Sri Wibawani yang berjudul “*Evaluasi Program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda Menuju Sustainable Development Goals Di Kota Surabaya*” yang dipublikasi dalam Jurnal *Syntax Transformation* Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020¹². Tujuan dari penelitian ini

¹¹ Panggabean, R. (2017). *Institusionalisasi Manajemen Konflik Berbasis Sekolah*. Sukma: Jurnal Pendidikan, 1(1), 197-218

¹² Putra, D. A., Rusmanjaya, R., Rusydany, M. H., & Wibawani, S. (2020). *Evaluasi Program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda Menuju Sustainable Development Goals Di kota Surabaya*. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(3), 7-13.

adalah untuk mengevaluasi efektivitas program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda dalam mengurangi angka kemiskinan dan mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan pendekatan deskriptif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa program SDGs yang diimplementasikan di Kota Surabaya melalui inisiatif Pejuang Ekonomi dan Pejuang Muda memiliki dampak positif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan perkembangan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM), hal ini didukung oleh data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

7. **Ketujuh**, penelitian yang dilakukan oleh Fajar yang berjudul “*Institusionalisasi Visi Politik Profetik Dalam Arus Revolusi Industri 4.0 Pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*” yang dipublikasi oleh Jurnal Vox Populi Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022¹³. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana visi politik profetik diterapkan secara institusional dalam konteks Revolusi Industri 4.0 pada Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilmu politik profetik, yang ditandai dengan keberadaan dimensi spiritual dan keutuhan, dapat menggabungkan dan beradaptasi dengan dinamika Revolusi Industri 4.0 yang lebih berfokus pada aspek empiris dan kemajuan dunia, bahkan hingga pada revolusi-revolusi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ilmu politik profetik dengan paradigma yang relevan masih dapat terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman.
8. **Kedelapan**, penelitian yang dilakukan oleh Mulyana, Yudi Wahyudin, Dudi Lesmana, Muarif, Fia Sri Mumpuni, dan Eko Rini Farastuti yang berjudul

¹³ Fajar, F. (2022). Institusionalisasi Visi Politik Profetik dalam Arus Revolusi Industri 4.0 Pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Vox Populi*, 5(1), 108-124.

“Evaluasi Dampak Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Bidang Studi Akuakultur” yang dipublikasi dalam Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022¹⁴. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada bidang studi Akuakultur Universitas Djuanda dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang melibatkan dosen dan mahasiswa sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa akuakultur yang mengikuti program MBKM memilih berpartisipasi dalam proyek kemanusiaan (42,86%), pertukaran pelajar (28,57%), magang atau praktek kerja (14,28%), dan kegiatan wirausaha (14,28%) di luar program studi yang mereka pilih. Namun, minat mahasiswa terhadap program MBKM dikategorikan sebagai biasa-biasa saja, dengan 57,14% dari mahasiswa memiliki tingkat minat tersebut. Dalam hal dosen, sebanyak 60% dari mereka telah mengetahui isi kebijakan MBKM. Namun, hanya 20% dari dosen yang mengetahui tentang konversi SKS yang diberikan kepada mahasiswa peserta MBKM. Dalam melaksanakan program MBKM, para dosen melihat adanya peningkatan yang signifikan pada kemajuan mahasiswa, dengan 80% dari dosen setuju dengan hal tersebut.

Tabel 1.5.2 Tinjauan Literatur

No	Judul Penelitian	Peneliti	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Institusionalisasi Internal Audit Capability Model Pada Aparat	Tyarlin Mariani	Kuantitatif Deskriptif	Penelitian ini juga mengkaji bagaimana sebuah kebijakan yang diimplementasikan	Penelitian akan menggunakan pendekatan kualitatif, seperti studi kasus, wawancara, observasi partisipatif, atau analisis konten untuk memahami dinamika institusional dan

¹⁴ Mulyana, M., Wahyudin, Y., Lesmana, D., Muarif, M., & Mumpuni, F. S. (2022). Evaluasi Dampak Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Bidang Studi Akuakultur. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1551-1564.

No	Judul Penelitian	Peneliti	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Pengawasan intern Pemerintah (Studi Kasus di Kementerian Luar Negeri)			akan berpengaruh terhadap pemegang.	interaksi antara aktor-aktor dalamnya. Sementara itu, penelitian di lembaga pemerintahan cenderung menggunakan metode penelitian kuantitatif, seperti survei, analisis statistik, atau pengumpulan data sekunder untuk mengukur kinerja institusi, mengidentifikasi tren, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berdasarkan bukti.
2	Institusionalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur..	Ari Susanti, Muhamad Suyunus	Kualitatif Deskriptif	Membahas bagaimana penerapan kebijakan baru akan berdampak di suatu insitusi dan bagaimana implikasinya.	Penelitian di Fakultas Ilmu Sosial UNJ akan dilakukan dalam konteks institusi pendidikan tinggi dan fokus pada aspek akademik, pengajaran, dan penelitian di bidang ilmu sosial. Sementara itu, penelitian pada lembaga pemerintahan akan dilakukan dalam konteks pemerintahan publik dan fokus pada proses kebijakan, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan di tingkat pemerintah. Konteks yang berbeda ini akan mempengaruhi metode penelitian yang digunakan dan pertanyaan penelitian yang diajukan.
3	Difusi dan Institusionalisasi Teknologi Instruksional Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Hasan Basri	Kualitatif Deskriptif	Kedua penlitian akan membahas institusionalisasi kebijakan baru yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.	Penelitian institusionalisasi program magang dan studi independen bersertifikat di Fakultas Ilmu Sosial UNJ lebih menitikberatkan pada studi tentang bagaimana program-program tersebut diintegrasikan ke dalam kurikulum fakultas. penelitian difusi dan institusionalisasi teknologi instruksional akan lebih fokus

No	Judul Penelitian	Peneliti	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					<p>pada implementasi dan adopsi teknologi instruksional dalam konteks pendidikan. Penelitian ini mungkin akan melibatkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi instruksional di berbagai institusi pendidikan, seperti faktor sosial, kebijakan, sumber daya, dan persepsi pengguna. Tujuannya adalah untuk memahami proses difusi teknologi instruksional, mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan strategi dan rekomendasi untuk institusi dalam memfasilitasi penggunaan teknologi instruksional secara efektif.</p>
4	Pendidikan Pondok Pesantren: Institusionalisasi Kelembagaan Pendidikan Pesantren	Rusydi Sulaiman	Kualitatif	Membahas institusionalisasi di suatu institusi pendidikan. Dan juga penelitian menitikberatkan konteks dari lingkungan yang diteliti.	Perbedaan antara penelitian institusionalisasi program magang dan studi independen bersertifikat di Fakultas Ilmu Sosial UNJ dengan penelitian difusi dan institusionalisasi teknologi instruksional di pesantren terletak pada konteks dan tujuan penelitian yang berbeda. Penelitian difusi dan institusionalisasi teknologi instruksional di pesantren akan mengeksplorasi cara pesantren mengadopsi dan memanfaatkan teknologi instruksional dalam pendidikan dan pengajaran agama.
5	Institusionalisasi Manajemen Konflik Berbasis Sekolah	Rizal Panggabean	Kualitatif Deskriptif	Terdapat persamaan yaitu topik pembahasan institusionalisasi di lingkungan pendidikan.	Perbedaan antara penelitian institusionalisasi program magang dan studi independen bersertifikat di Fakultas Ilmu Sosial UNJ dengan penelitian institusionalisasi manajemen konflik berbasis sekolah terletak

No	Judul Penelitian	Peneliti	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					<p>pada fokus penelitian dan konteks implementasinya. Penelitian institusionalisasi program magang dan studi independen bersertifikat di Fakultas Ilmu Sosial UNJ mungkin akan lebih berfokus pada upaya meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa melalui program-program magang dan studi independen. Penelitian institusionalisasi manajemen konflik berbasis sekolah akan lebih fokus pada implementasi dan pengembangan strategi manajemen konflik di lingkungan sekolah. Penelitian ini akan melibatkan identifikasi pola konflik yang ada, evaluasi keefektifan strategi manajemen konflik yang telah diterapkan, serta merumuskan rekomendasi untuk memperbaiki sistem manajemen konflik di sekolah. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, mendukung pembelajaran yang optimal, dan memfasilitasi pemecahan konflik dengan cara yang konstruktif.</p>
6	Evaluasi Program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda Menuju Sustainable Development Goals Di Kota Surabaya	Putra <i>et al</i>	Literature Review	Adanya persamaan yaitu topik penelitian adalah salah satu program kampus merdeka dan dampaknya.	Penelitian evaluasi program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda menuju Sustainable Development Goals di Kota Surabaya akan lebih menitikberatkan pada evaluasi program-program yang telah dilaksanakan di tingkat kota. Sedangkan penelitian ini akan meneliti insititusi pendidikan dan implementasi perubahan kurikulum.

No	Judul Penelitian	Peneliti	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
7	Institusionalisasi Visi Politik Profetik Dalam Arus Revolusi Industri 4.0 Pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Fajar	Kualitatif	Kedua penelitian membahas insitucionalisasi kebijakan baru dalam suatu perguruan tinggi. Kebijakan yang dibuat berlandaskan perkembangan industry.	Penelitian institusionalisasi program magang dan studi independen bersertifikat di Fakultas Ilmu Sosial UNJ mungkin akan lebih berfokus pada pengembangan dan perbaikan program-program magang dan studi independen di Fakultas tersebut. Penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas program-program tersebut, mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa, serta merumuskan strategi dan perbaikan yang perlu dilakukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program-program tersebut di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial UNJ. Di sisi lain, penelitian institusionalisasi visi politik profetik dalam arus Revolusi Industri 4.0 pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar akan lebih menitikberatkan pada integrasi visi politik profetik dengan perkembangan teknologi dan dampaknya pada ilmu politik.
8	Evaluasi Dampak Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Bidang Studi Akuakultur	Mulyana <i>et al</i>	Kuantitatif Deskriptif	Penelitian ini juga membahas evaluasi program MBKM. Seperti dampaknya terhadap mahasiswa yang mengikuti. Serta kekurangan dan kelebihanannya.	Penelitian di Fakultas Ilmu Sosial UNJ akan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan khusus di kampus tersebut, serta faktor-faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan program magang dan studi independen bersertifikat. Sementara itu, penelitian tentang program Kampus Merdeka di kampus lain juga akan memperhatikan perbedaan dalam kebijakan, budaya akademik, dan infrastruktur pendukung yang

No	Judul Penelitian	Peneliti	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					ada di lingkungan kampus tersebut..

1.6 Kerangka Konsep

1.6.1 Kampus Merdeka

Kampus Merdeka merupakan salah satu arahan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, yang memberikan kebijakan bagi pendidikan tinggi untuk belajar di luar program sarjana selama tiga semester. Konsep kampus mandiri merupakan pendekatan fundamental yang inovatif, memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri di lingkungan universitas. Tujuan dari Kampus Merdeka adalah mendorong mahasiswa untuk memperoleh pemahaman yang luas dalam berbagai bidang ilmu yang relevan dengan dunia kerja. Dalam Kampus Merdeka, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memilih program studi yang ingin mereka tekuni. Kebijakan Kebebasan Belajar - Kampus Mandiri ini sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diatur dalam dokumen Depdikbud 2020 No.3. Pasal 18 menyatakan bahwa waktu dan beban studi dapat dipenuhi oleh mahasiswa tingkat sarjana (S1) atau mahasiswa yang setara dengan tingkat S1..

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) telah menarik minat yang signifikan dari mahasiswa-mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini terbukti dari jumlah peserta MBKM yang tinggi sepanjang tahun 2021. Data yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021, ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia, tepatnya sebanyak 43.650 mahasiswa, telah mengikuti program

MBKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek dalam beragam jenis program yang ditawarkan.¹⁵

Dalam menghadapi dinamika sosial, perubahan budaya, dunia kerja yang terus berkembang, dan kemajuan teknologi yang pesat, penting bagi perguruan tinggi untuk mempersiapkan kompetensi mahasiswa agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, perguruan tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, sehingga mahasiswa dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal dan selalu relevan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sesuai dengan tuntutan industri dan dunia kerja. Keberhasilan ini mendorong Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerapkan Kampus Merdeka, yang memberikan perguruan tinggi otonomi yang lebih besar. Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Tujuan Kampus Merdeka adalah menciptakan budaya belajar yang inovatif, yang tidak membatasi dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Merdeka Belajar juga memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, menghindari birokratisasi yang rumit, dan memberikan mahasiswa kebebasan untuk memilih bidang studi yang mereka minati.

Program Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka mendorong mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020¹⁶. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kampus

¹⁵ Astungkoro, Ronggo., & Puspita, Ratna. (2021). Kemendikbudristek Minta Peserta MBKM tak Khawatir Soal Uang Saku Terhambat. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/r4s3my428/kemendikbudristek-minta-peserta-mbkm-tak-khawatir-soal-uang-saku-terhambat> pada 19 April 2022.

¹⁶ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.. 2020. Sambutan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi. Diakses melalui <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/about/sambutan-dirjen-dikti> pada 15 Januari 2023

Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh industri dan dunia kerja saat ini. Tujuan dari pemberian hak belajar selama 3 semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik dari segi *soft skills* maupun *hard skills*, sehingga mereka siap dan relevan dengan tuntutan zaman, serta mampu menjadi pemimpin masa depan yang unggul dan berkepribadian. Program *experiential learning* (pembelajaran berdasarkan pengalaman langsung) yang fleksibel dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk memberikan hak kepada mahasiswa untuk secara sukarela mengambil mata kuliah di luar perguruan tinggi selama maksimal 2 semester dengan total 40 SKS. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama selama 1 semester dengan total 20 SKS.

1.6.2 Magang dan Studi Independen Bersertifikat

Kebijakan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2020 telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri di luar lingkungan perguruan tinggi. Dalam kebijakan MBKM ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengambil 20 SKS atau setara dengan 2 semester di luar perguruan tinggi, serta mengambil 20 SKS atau 1 semester pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama (Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi)¹⁷. Aktivitas yang dapat dilakukan dalam Program MBKM antara lain pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan wirausaha, magang/praktek kerja di industri atau tempat kerja lainnya, proyek pengabdian masyarakat di desa, dan partisipasi dalam seminar nasional serta konferensi ilmiah mengenai implementasi dan

¹⁷ Junaidi, A.; Wulandari, D.; Arifin, S.; et al., (2020), Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

dampak MBKM. Tantangan besar seorang peserta magang bukanlah memiliki pengetahuan yang cukup, namun bagaimana menerapkan pengetahuan yang dimiliki secara langsung.¹⁸ Melalui kebijakan ini, tujuan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah meningkatkan kompetensi lulusan, baik dalam hal *soft skills* maupun *hard skills*, agar mereka siap dan relevan dengan tuntutan zaman, serta menjadi pemimpin masa depan yang unggul dan berkepribadian. Program-program pembelajaran eksperimental yang menawarkan fleksibilitas diharapkan dapat membantu mahasiswa mengembangkan potensi sesuai dengan minat dan bakat mereka.

MBKM memberikan kesempatan luas bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri di luar kampus melalui pengalaman berbasis lapangan, yang akan meningkatkan kompetensi mereka secara keseluruhan dan mempersiapkan mereka untuk dunia kerja atau menciptakan peluang kerja baru. Proses pembelajaran dalam MBKM menekankan pada pendekatan berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*). Selain itu, melalui partisipasi dalam program MBKM, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi penting, seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, empati, berpikir kritis, serta pemahaman tentang logika digitalisasi dan komputasi. Selain itu, program ini juga memberikan manfaat tambahan berupa pengembangan *soft skills* yang relevan dengan adaptasi terhadap lingkungan baru dan persiapan untuk dunia kerja di masa depan¹⁹. Dengan demikian, program MBKM berupaya menjawab tantangan yang signifikan dalam menghubungkan dan mencocokkan antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri.

¹⁸ Kiser, P. M. (2015). *The human services internship: Getting the most from your experience*. Cengage Learning.

¹⁹ Wulandari, D.; Arifin, S.; Cahyono, E. et al., (2021), *Panduan Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

1.6.3 Teori Institusional

Teori institusional adalah teori yang menjelaskan tentang terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan institusionalisme. Pemikiran yang mendasari teori terjadinya ini adalah bahwa suatu kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan peraturan dan prosedur suatu institusi yang menjalankannya²⁰. Teori institusionalisasi menunjukkan bahwa kebijakan atau program baru sering menghadapi penolakan dan perjuangan untuk diterima dalam struktur sosial dan organisasi yang mapan. Ia berargumen bahwa agar sebuah program baru berhasil, ia harus dapat memperoleh legitimasi dan dilembagakan dalam konteks sosial dan politik yang ada. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memungkinkan atau menghambat pelaksanaan program magang dan belajar mandiri bersertifikat, dan bagaimana program tersebut dipahami dan diadopsi oleh berbagai pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan²¹.

Pada intinya, institusionalisme mengakui bahwa individu tidak semata-mata didorong oleh preferensi dan rasionalitas mereka sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem dan struktur sosial yang lebih besar di mana mereka berada. Institusi, dalam konteks ini, merujuk pada pola aturan dan praktik yang bertahan lama yang memandu perilaku dan memberikan stabilitas dan prediktabilitas pada kehidupan sosial. Lembaga-lembaga ini dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk sistem hukum, organisasi, sistem pendidikan, lembaga keagamaan, dan norma budaya. Teori ini mengkaji bagaimana institusi diciptakan, dipertahankan, dan diubah dari waktu ke waktu, dan bagaimana mereka membentuk perilaku individu dan kolektif. Ini berusaha untuk memahami proses melalui mana lembaga memberikan pengaruh dan kontrol,

²⁰ Peters, G., & Pierre, J. (1999). *The new institutionalism in political science*. London/New York.

²¹ Calhoun, C. (Ed.). (2010). Robert K. Merton: *Sociology of science and sociology as science*. Columbia University Press.

serta cara individu dan kelompok menanggapi dan menentang pengaturan kelembagaan ini.²²

Institusionalisme menekankan konsep keterlekatan, yang mengacu pada gagasan bahwa individu tertanam dalam struktur dan sistem sosial. Ini berarti bahwa perilaku dan pilihan individu dipengaruhi oleh konteks sosial di mana mereka berada. Mereka bukan aktor terisolasi yang membuat keputusan semata-mata berdasarkan preferensi dan rasionalitas mereka, tetapi dipengaruhi oleh norma, nilai, dan aturan institusi yang mengelilingi mereka²³. Teori ini memberikan kerangka kerja yang memungkinkan individu bekerja sama, berkoordinasi, dan mencapai tujuan bersama. Misalnya, institusi seperti undang-undang dan peraturan menciptakan struktur agar masyarakat berfungsi dengan menetapkan standar perilaku, menyelesaikan konflik, dan menyediakan mekanisme untuk tatanan sosial. Teori institusional merupakan suatu pendekatan dalam ilmu sosial yang menekankan peran institusi atau lembaga-lembaga dalam membentuk, mempengaruhi, dan mengarahkan tingkah laku individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Teori ini juga dapat diterapkan dalam analisis kebijakan publik untuk memahami bagaimana institusi-institusi publik mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan implementasinya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai teori institusional dalam kebijakan publik:

Richard Scott adalah salah satu tokoh penting dalam teori institusional, yang mengembangkan pendekatan tiga dimensi dalam institusi. Ia mengatakan bahwa institusi adalah proses yang membentuk perilaku individu dan organisasi, dan dapat dipahami melalui interaksi dari tiga dimensi ini: regulatif, normatif, dan kultural-kognitif²⁴. Ia juga menyatakan bahwa dimensi-dimensi ini saling tergantung dan bahwa

²² Powell, W. W., & DiMaggio, P. J. (Eds.). (2012). *The new institutionalism in organizational analysis*. University of Chicago press.

²³ Fioretos, O., Falleti, T. G., & Sheingate, A. (Eds.). (2016). *The Oxford handbook of historical institutionalism*. Oxford University Press.

²⁴ Scott, W. R., & Davis, G. F. (2015). *Organizations and organizing: Rational, natural and open systems perspectives*. Routledge.

proses institusi adalah kompleks, dinamis dan berkelanjutan. institusi dapat dipahami melalui dimensi berikut:

1. Dimensi regulatif: ini mengacu pada aturan formal, prosedur, dan rutinitas yang membentuk perilaku suatu organisasi atau institusi.
2. Dimensi normatif: ini mengacu pada nilai-nilai, keyakinan, dan harapan yang dibagi yang membentuk perilaku individu dalam suatu organisasi atau institusi.
3. Dimensi kultural-kognitif: ini mengacu pada pemahaman yang dibagi, makna, dan simbol yang membentuk identitas suatu organisasi atau institusi.

Teori pelembagaan tiga dimensi yang dikembangkan oleh Richard Scott dapat diterapkan untuk memahami apakah fakultas mendukung atau tidak pelaksanaan program magang dan studi mandiri bersertifikat.

1. Dimensi regulatif mengacu pada aturan formal, prosedur, dan rutinitas yang membentuk perilaku organisasi atau lembaga. Dalam hal ini dapat mengacu pada kebijakan dan peraturan yang mengatur pelaksanaan program magang dan studi mandiri bersertifikat di lingkungan fakultas. Jika anggota fakultas menganggap aturan dan prosedur ini jelas, adil, dan layak, mereka lebih mungkin mendukung pelaksanaan program.
2. Dimensi normatif mengacu pada nilai-nilai bersama, keyakinan, dan harapan yang membentuk perilaku individu dalam suatu organisasi atau lembaga. Dalam hal ini dapat mengacu pada nilai dan keyakinan yang dianut oleh para dosen mengenai pentingnya experiential learning dan peran program magang dan sertifikasi dalam pendidikan mahasiswa. Jika anggota fakultas menganggap program-program ini sejalan dengan nilai dan keyakinan mereka sendiri, mereka lebih cenderung mendukung implementasi program.
3. Dimensi budaya-kognitif mengacu pada pemahaman, makna, dan simbol bersama yang membentuk identitas suatu organisasi atau lembaga. Dalam

hal ini dapat mengacu pada persepsi fakultas tentang peran program dalam membentuk identitas dan reputasi fakultas, dan bagaimana keselarasannya dengan visi dan misi fakultas. Jika anggota fakultas menganggap program tersebut memberikan kontribusi positif terhadap identitas dan reputasi fakultas, mereka lebih cenderung mendukung pelaksanaan program tersebut.

1.6.4 Learning Outcome

Learning outcome merupakan panduan penting dalam dunia pendidikan yang membantu merancang dan mengukur hasil dari proses pembelajaran. *Learning outcome* menggambarkan tujuan yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan suatu kursus atau program pendidikan. Ini adalah pernyataan yang jelas, terukur, dan spesifik mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan siswa kuasai. Terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, *learning outcome* mencerminkan esensi dari apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran²⁵.

Dalam konteks pengetahuan, *learning outcome* merujuk pada pemahaman konsep, fakta, teori, dan informasi yang diharapkan mahasiswa pahami. Ini melibatkan kedalaman pengetahuan mahasiswa tentang materi pembelajaran dan kemampuan mereka untuk menghubungkan konsep-konsep tersebut dalam berbagai konteks. Sementara itu, keterampilan mencakup kemampuan praktis yang mahasiswa dapat terapkan dalam situasi dunia nyata. *Learning outcome* keterampilan mengharuskan mahasiswa untuk dapat menggunakan alat, teknik, atau proses tertentu dengan kompetensi dan kreativitas. Di sisi lain, sikap melibatkan nilai-nilai, etika, dan perilaku yang diharapkan mahasiswa tunjukkan. Ini mencakup aspek kepribadian dan moral, seperti tanggung jawab, kerjasama, dan etika profesional.

²⁵ Hussey, T., & Smith, P. (2002). The trouble with learning outcomes. *Active learning in higher education*, 3(3), 220-233.

Manfaat dari learning outcome sangat beragam. Pertama-tama, learning outcome membantu mengarahkan tujuan pembelajaran dengan jelas. Ini membantu pengajar dan pengembang kurikulum untuk tetap fokus pada apa yang ingin dicapai oleh mahasiswa. Dengan tujuan yang jelas ini, pengajaran dapat dirancang dengan lebih efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan²⁶. Learning outcome juga memberikan panduan bagi pengajar dalam merancang rencana pembelajaran yang terstruktur dan terarah. Ini menciptakan kerangka kerja yang membantu mereka memilih metode, alat bantu, dan aktivitas yang paling cocok untuk mencapai tujuan tersebut. *Learning outcome* juga memiliki dampak positif pada proses evaluasi. Kurikulum akan sangat terbantu dengan memiliki pernyataan learning outcome yang jelas, evaluasi terhadap pencapaian mahasiswa dapat dilakukan dengan lebih objektif dan akurat. Mahasiswa dapat dinilai berdasarkan sejauh mana mereka mencapai learning outcome yang ditetapkan, sehingga evaluasi menjadi lebih transparan dan adil.

Learning outcome juga dapat meningkatkan pembelajaran mahasiswa. Mahasiswa memiliki arahan yang lebih jelas tentang apa yang harus mereka capai. Ini juga dapat meningkatkan motivasi dan kemandirian mahasiswa dalam belajar, karena mereka tahu dengan pasti apa yang diharapkan dari mereka. Konsep learning outcome memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum, pelaksanaan pengajaran, dan evaluasi hasil belajar mahasiswa²⁷. *Learning outcome* di perguruan tinggi merujuk pada pernyataan konkret yang menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan mahasiswa kuasai setelah menyelesaikan program studi atau mata kuliah tertentu. Dalam konteks perguruan tinggi, learning outcome memiliki karakteristik yang khas dan vital dalam mendukung proses pendidikan yang efektif.

²⁶ Mahajan, M., & Singh, M. K. S. (2017). Importance and benefits of learning outcomes. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 22(03), 65-67.

²⁷ Kennedy, D. (2006). Writing and using learning outcomes: a practical guide. University College Cork.

Aspek penting dari *learning outcome* di perguruan tinggi adalah pemberdayaan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Konsep ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dengan pengetahuan yang mendalam dan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam situasi dunia nyata. Selain itu, *learning outcome* juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis, adaptasi terhadap perubahan, dan kemampuan pemecahan masalah yang kompleks. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berubah, *learning outcome* di perguruan tinggi berperan sebagai panduan untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kecakapan yang relevan dan mampu berkontribusi dalam berbagai konteks.

Learning outcome di perguruan tinggi juga memiliki hubungan yang erat dengan persiapan mahasiswa untuk dunia kerja. Program-program seperti ilmu kedokteran, teknik, bisnis, dan lain sebagainya, merancang *learning outcome* yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja. Ini mencakup penerapan praktik-praktik terbaru dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dalam bidang masing-masing. Oleh karena itu, *learning outcome* di perguruan tinggi bukan hanya tentang akademik semata, tetapi juga tentang mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi profesional yang berkualitas. *Learning outcome* di perguruan tinggi juga menekankan pada pemahaman mendalam terhadap materi pembelajaran. Mahasiswa tidak hanya diharapkan untuk menguasai konsep-konsep dasar, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan ini dalam situasi dunia nyata. Hal ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis informasi, menghubungkan konsep-konsep yang berbeda, dan mengembangkan pandangan yang kritis dan abstrak terhadap isu-isu tertentu. *Learning outcome* ini mendukung pembelajaran yang lebih mendalam dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan global.

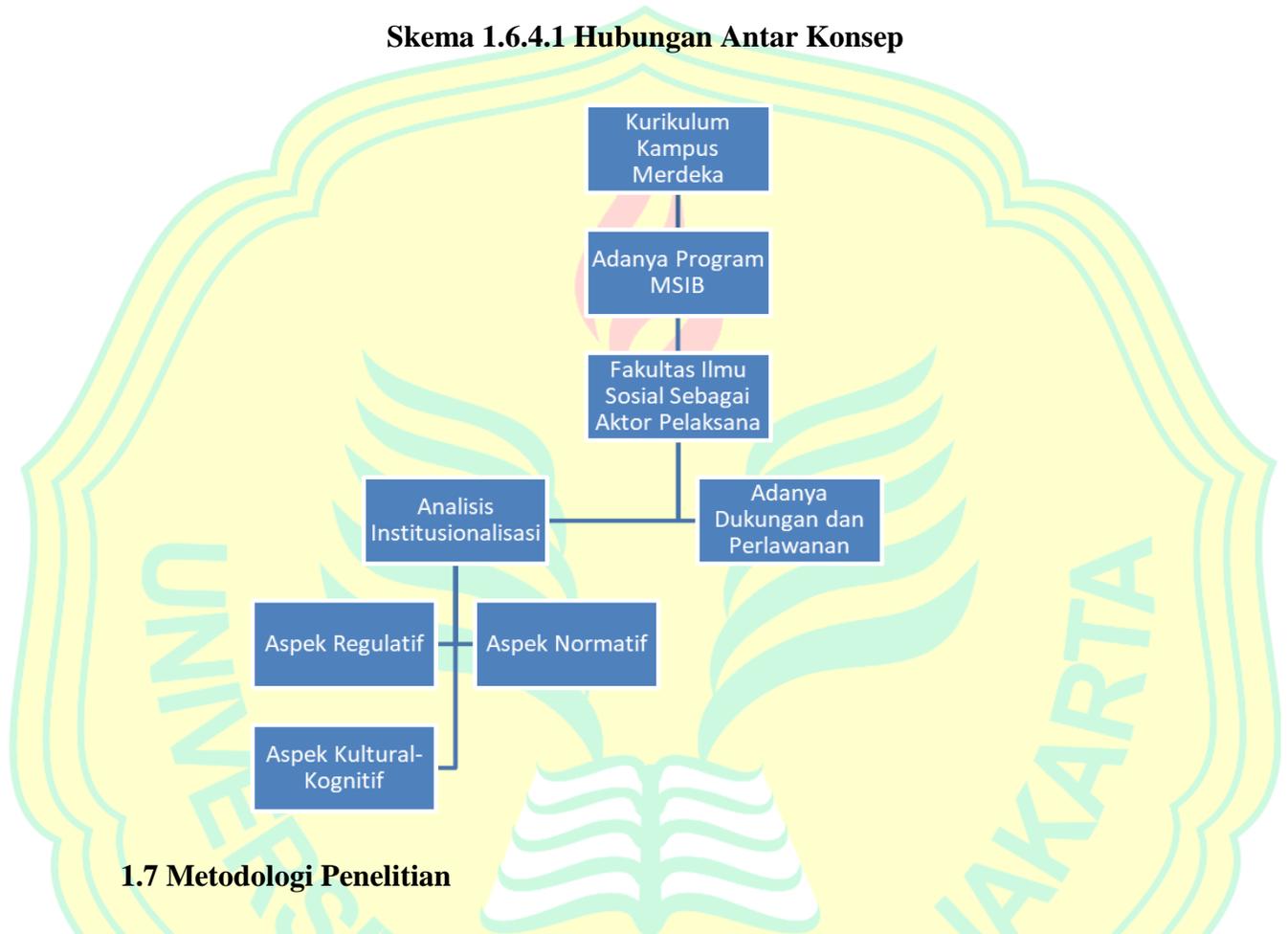
Learning outcome memiliki peran dalam membentuk hubungan antara program magang dan studi independen bersertifikat di perguruan tinggi. *learning outcome* menjadi pemandu yang mengarahkan pengalaman belajar mahasiswa dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Program magang dan studi independen bersertifikat menawarkan kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh di lingkungan yang nyata. *Learning outcome* yang diterapkan dalam program ini membantu memetakan tujuan yang harus dicapai oleh mahasiswa selama berpartisipasi dalam magang atau studi independen.

Program magang menggunakan *learning outcome* untuk memberikan panduan yang jelas bagi mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan praktis, menerapkan konsep teoritis dalam situasi dunia nyata, serta beradaptasi dengan dinamika industri. Mahasiswa dapat mengukur pencapaian mereka dengan merujuk pada *learning outcome* yang telah ditetapkan, memastikan bahwa mereka mencapai tujuan yang diharapkan selama periode magang. Studi independen bersertifikat menggunakan *learning outcome* dalam membantu merancang konten dan tujuan pembelajaran yang relevan dengan minat dan tujuan karir mahasiswa. Melalui penilaian *learning outcome* dalam program ini, institusi pendidikan dapat menilai sejauh mana mahasiswa telah berhasil mencapai hasil pembelajaran yang telah ditentukan. Pengintegrasian *learning outcome* dalam program magang dan studi independen bersertifikat juga memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang holistik. Mereka tidak hanya diberikan peluang untuk memperdalam pengetahuan akademis, tetapi juga mengasah keterampilan sosial, profesional, dan berpikir kritis. *Learning outcome* mengingatkan mahasiswa tentang tujuan mereka yang lebih besar dan membantu mereka melihat bagaimana pengalaman praktis ini berkontribusi pada perkembangan pribadi dan akademis mereka. *learning outcome* juga memfasilitasi proses evaluasi yang transparan dan objektif, memungkinkan perguruan tinggi untuk mengukur kesuksesan mahasiswa dalam mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan.

1.6.5 Hubungan Antar Konsep

Skema 1.6.4.1 Hubungan Antar Konsep



1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian dapat mengkaji fenomena yang ada ditengah masyarakat secara langsung. Sehingga, dapat meningkatkan realitas sosial dan fokus pada proses yang interaktif. Metode penelitian yang akan digunakan adalah studi kasus. Melalui studi kasus, maka penelitian melalui proses komprehensif untuk mendapatkan data selengkap mungkin dan mendetail²⁸.

²⁸ W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods (Metode penelitian sosial)*, terj. Edina T. Sofia (Jakarta: PT Indeks, 2013), hal. 57

1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah koorprodi sebagai agen pelaksana implementasi program MSIB di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta karena koorprodi yang menentukan dan memiliki otonomi bagaimana program MSIB diimplementasikan di program studinya masing-masing. Kemudian Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNJ yang mengikuti program MSIB angkatan ketiga juga dijadikan informan pendukung. Dalam hal ini terdapat 12 informan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.7.2.1 Subjek Penelitian

No	Inisial	Jenis Kelamin	Peran	Status	Program Studi
1	Pak ARH	Laki-Laki	Informan Kunci	Koorprodi	Sosiologi
2	Bu DS	Perempuan	Informan Kunci	Koorprodi	Ilmu Komunikasi
3	Pak S	Laki-Laki	Informan Kunci	Koorprodi	Pendidikan Sosiologi
4	Bu DS	Perempuan	Informan Kunci	Koorprodi	Pendidikan IPS
5	Pak S	Laki-Laki	Informan Kunci	Koorprodi	Geografi
6	Pak FW	Laki-Laki	Informan Kunci	Wakil Dekan 1	Fakultas Ilmu Sosial
7	NFDIN	Laki-laki	Informan Kunci	Peserta MSIB	Sosiologi
8	MND	Laki-laki	Informan Pendukung	Peserta MSIB	Pendidikan IPS
9	FRS	Laki-laki	Informan Pendukung	Peserta MSIB	Ilmu Komunikasi
10	HH	Perempuan	Informan Pendukung	Peserta MSIB	Ilmu Komunikasi
11	PANS	Perempuan	Informan Pendukung	Peserta MSIB	Pendidikan Sosiologi
12	S	Perempuan	Informan triangulasi	Dosen	Teknologi Pendidikan

1.7.3 Lokasi dan Waktu

Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan kampus Universitas Negeri Jakarta yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan juga secara daring dalam jaringan. Selain itu penelitian juga akan dilaksanakan di tempat yang telah disetujui antara dengan peneliti dan juga informan. Untuk pelaksanaan penelitian, Penelitian ini akan dimulai dari November 2022 sampai dengan Mei 2023.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan mahasiswa yang dapat memberikan informasi yang relevan. Yaitu dosen yang memiliki peran dalam pelaksanaan MSIB serta mahasiswa peserta program Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Wawancara akan dilaksanakan baik secara tatap muka ditempat yang telah ditentukan, maupun secara daring dalam jaringan melalui platform *Google Meet*.

2. Dokumentasi

Dokumen memiliki bentuk yang beragam baik dari yang tertulis sederhana sampai yang lebih komprehensif, bahkan dapat berupa benda-benda lain seperti misalnya media digital. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data seputar kegiatan yang dilakukan partisipan peserta magang dan studi independen bersertifikat.. Data dari dokumentasi diperoleh dari mahasiswa peserta program magang bersertifikat dan juga pihak administrasi dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta terkait dengan pelaksanaan program ini.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah pengolahan data. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data adalah (1) data reduction; (2) data display; dan (3) conclusion drawing/verification²⁹.

1. Data Reduction

Proses reduksi data melibatkan rangkuman, pemilihan inti dari informasi yang relevan, fokus pada hal-hal yang penting, serta penemuan tema dan pola. Melalui proses ini, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih terperinci, memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya, serta memfasilitasi pencarian data jika dibutuhkan..

2. Data Display

Dalam konteks penelitian kualitatif, presentasi data dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti rangkuman ringkas, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain sebagainya. Namun, pendekatan yang paling umum dan sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah melalui teks naratif yang mendalam dan berdeskripsi..

3. Conclusion Drawing/Verification

Kesimpulan awal yang diajukan pada tahap awal penelitian masih bersifat preliminer dan dapat berubah apabila tidak ada bukti yang kuat yang mendukungnya pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sebagai kesimpulan yang memiliki kredibilitas..

²⁹ W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods (Metode penelitian sosial)*, terj. Edina T. Sofia (Jakarta: PT Indeks, 2013),

1.7.6 Triangulasi Data

Triangulasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang melibatkan penggabungan berbagai teknik dan sumber data yang sudah ada. Dalam pengumpulan data dengan menggunakan metode triangulasi, dilakukan pengujian terhadap kredibilitas data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang berbeda. Triangulasi data dapat dilakukan melalui wawancara dengan pakar pendidikan untuk memperoleh pemahaman tentang dampak dan implikasi implementasi program MSIB terhadap kegiatan akademik. Selanjutnya, jawaban dari berbagai informan akan dicocokkan untuk memperoleh hasil yang lebih reliabel dan valid..

1.7.7 Sistematika Penulisan

BAB I

Pada bab ini penulis memaparkan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan penelitian sejenis, metode hingga teknik yang digunakan. Pada bab ini juga peneliti memaparkan kerangka konsep yang relevan dengan masalah penelitian. Bab ini juga diperlengkapi dengan informasi mengenai lokasi penelitian, waktu penelitian dan subjek yang dijadikan topik utama dalam penelitian.

BAB II

Pada bab ini penulis akan menjelaskan deskripsi secara umum mengenai implementasi program magang dan studi independen bersertifikat yang diteliti. Pertama dimulai dengan menjelaskan program MSIB Kampus Merdeka. Dilanjutkan dengan profil informan dan sejarah dibentuknya program MSIB. Kredensial informan yang diwawancarai oleh penulis juga akan dijelaskan

BAB III

Penulis menjelaskan hasil yang diperoleh dari pengumpulan data. Terutama dari segi kegiatan yang dilakukan dengan prosedur pelaksanaan atas dasar dilakukannya program MSIB. Kemudian faktor pendukung dan penghambat juga dijelaskan dalam deskripsi naratif yang dimuat dalam penjabaran pada teori ini.

BAB IV

Pada bab ini peneliti berusaha menjelaskan hasil penemuan serta relevansinya dengan teori dan konsep yang telah dijabarkan. Konsep yang terdiri atas kampus merdeka, magang dan studi independen bersertifikat, dan teori institusional saling dikaitkan satu sama lain dijelaskan pada bab ini.

BAB V

Bab ini berisi kesimpulan yaitu jawaban ringkas dari pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Kemudian saran bagi pihak pembaca yang diperoleh dari hasil temuan penelitian.